

LAMPIRAN

Lampiran 1

Soal Kesetiaan Gibran pada PDIP, FX Rudy: Saya Tak Pernah Berpikir Negatif, Mestinya 100 Persen

Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo usai peresmian gedung baru Kantor DPC PDIP Kota



Solo, Senin, 16 Oktober 2023. TEMPO/SEPTIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Solo - Putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres pada Senin, 16 Oktober 2023 membuka peluang bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju dalam Pilpres 2024.

Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Solo FX Hadi Rudyatmo enggan memberikan banyak komentar. Rudy, sapaan akrabnya, mengatakan pihaknya sejak awal menghormati apapun keputusan MK. "Tidak ada yang berlebih menurut saya. Kita harus hormati putusan tersebut. Bahkan dari awal saya sampaikan, keputusan apapun yang diputuskan lembaga yudikatif, ya kita sebagai kader partai harus menghormati," ujar Rudy ketika ditemui awak media di sela-sela peresmian gedung baru Kantor DPC PDIP Kota Solo, Senin, 16 Oktober 2023.

Soal langkah selanjutnya, Rudy mengatakan pihaknya akan terus melakukan konsolidasi partai. Targetnya adalah melaksanakan dan memenangkan rekomendasi Ketua Umum PDIP "Kita konsolidasi terus *wae*," ucap dia. Disinggung tentang kesetiaan Gibran terhadap PDIP, Rudy mengatakan hingga kini tak pernah berpikir negatif terhadap kesetiaan itu. "Saya tidak pernah berpikir negatif. Tentang Mas Wali, kesetiaan Mas Wali sebagai kader PDIP semestinya 100 persen," katanya. Dimintai tanggapan tentang adanya pernyataan bahwa Gerindra melirik Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres), Rudy mengatakan pertanyaan itu sebaiknya disampaikan kepada yang melirik Gibran tersebut "Ya tanya yang melirik dong. Tugas saya kan melaksanakan atau memenangkan rekomendasi ketua umum itu saja. Titik," ungkap dia.

Lampiran 2

Kata Muzani soal Sinyal Gibran Merapat ke Golkar



Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menjawab pertanyaan awak media pengumuman nama bakal cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Foto diambil di Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu, 15 Oktober 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan belum ada komunikasi dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ketika ditanya jurnalis soal kemungkinan putra Jokowi itu merapat ke Golkar.

"Saya belum ketemu mas Gibran jadi saya belum bisa memberikan banyak komentar," kata dia saat ditemui dalam acara perayaan Ulang Tahun ke 72 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Rabu, 18 Oktober 2023.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono memberi sinyal soal bergabungnya Gibran Rakabuming Raka ke partainya. Hal tersebut diungkapkan beberapa waktu lalu. Ditanya soal peluang Gerindra merekrut Gibran jadi cawapres usai putusan Mahkamah Konstitusi, Muzani hanya mengatakan putusan MK itu membuka peluang bagi siapapun yang memenuhi diktum dari MK tersebut.

"Keputusan MK adalah keputusan yang memberi keleluasaan pada mereka yang menjabat wali kota, bupati, gubernur atau wakilnya, DPD, DPRD, DPR RI sedang atau pernah yang umurnya di bawah 40 tahun. Untuk menjadi atau berkontestasi dalam kepemimpinan nasional itu," kata dia.

Sementara itu, Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan keputusan MK itu bukan hanya diperuntukan bagi Gibran. "Itu tidak hanya kemudian kepada hanya sosok satu nama saja," katanya saat ditemui di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Selasa, 17 Oktober 2023.

Ia mengatakan kalau putusan MK yang final dan mengikat serta bersifat langsung itu membuka kesempatan kepada para kepala daerah yang sedang menjabat untuk yang berumur 40 tahun ke bawah tentunya untuk menjadi kandidat capres maupun cawapres. "Sehingga spekulasi spekulasi yang muncul itu juga adalah bagian dari dinamika," ujar Dasco. Dasco mengklaim semua permasalahan dalam Koalisi Indonesia Maju dibicarakan dan dimusyawarahkan bersama. Begitu pula pengambilan keputusan, kata Dasco, dilakukan bersama-sama.

Lampiran 3

Tanggapan Gibran saat Santer Dikabarkan Ikut Bikin SKCK: Silakan Cek



Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi santernya kabar soal Menteri BUMN Erick Thohir menjadi cawapres Prabowo Subianto, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 18 Oktober 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Solo - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah informasi yang beredar bahwa dirinya membuat surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) untuk persiapan mendaftarkan diri di ajang Pilpres 2024. Kabar itu mencuat setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir diketahui mengurus surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) "*Neng endi wong neng kene terus nuh. Aku neng kene terus lho* (Di mana, saya kan di sini terus lho)," ujar Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo, Kamis pagi, 19 Oktober 2023.

Saat dimintai ketegasan, Gibran justru meminta agar media tidak membuat resah. "(Jadi tidak membuat SKCK?) Jangan membuat berita yang membuat resah ya," jawabnya. Disinggung apakah kabar dirinya membuat SKCK itu hoaks atau informasi bohong, Gibran justru meminta agar media mencari tahu sendiri "*Yo golekono aku ngurus SKCK nengndi kan ngono? Kan aku neng kene terus?* (Ya coba cari saja saya mengurus SKCK di mana, kan begitu? Kan saya di sini terus)," katanya.

Soal kabar SKCK tersebut dibuat di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), Gibran meminta awak media memastikannya sendiri di Polda Jateng. "*Ya ceken neng Polda, telponen Polda. Ceken apa Gibran ngurus SKCK* (silakan cek di Polda. Telepon Polda. Cek apa benar Gibran mengurus SKCK)," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir diketahui telah mengurus surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel. Dalam foto surat yang diperoleh Tempo, PN Jaksel menyatakan surat itu dibuat sebagai syarat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden "Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Wakil Presiden Republik Indonesia," begitu cuplikan isi surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua PN Jaksel Wahyu Imam Santoso tersebut. Surat itu tertanggal 16 Oktober 2023. Dalam keterangannya, PN Jaksel menyatakan Erick tak pernah tersangkut masalah hukum.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapi," begitu tulis PN Jaksel. Humas PN Jaksel mengakui pihaknya keluaran surat tersebut. Humas PN Jaksel, Djuyamto membenarkan pihaknya mengeluarkan surat tersebut. "Betul," kata dia singkat kepada Tempo, Rabu, 18 Oktober 2023.

Lampiran 4

Waketum Gerindra Akui Nama Gibran Rakabuming Masih Masuk Bursa Cawapres Pendamping Prabowo



Spanduk bergambar Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Joko Widodo terpampang di depan Rumah Indonesia Maju, Jalan Erlangga II, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023. Rumah Indonesia Maju yang disebut sebagai rumah pemenangan Prabowo-Gibran muncul disaat Prabowo belum menentukan cawapresnya untuk Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengakui nama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, masih masuk dalam daftar calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Penentuan siapa sosok cawapres pendamping Prabowo masih menunggu seluruh ketua umum partai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) berada di Indonesia.

"Masih lah (Gibran dipertimbangkan). Karena kan kita masih menunggu sampai semua pimpinan KIM pulang ke Indonesia untuk bisa dirapatkan bersama," ujar Rahayu saat ditemui di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 19 Oktober 2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan gugatan uji materi soal ambang batas minimal usia capres dan cawapres pada Senin, 16 Oktober 2023. Dari lima gugatan, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbiru.

Dalam putusannya, MK menilai batasan usia minimal 40 tahun bagi capres dan cawapres melanggar Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Artinya seseorang yang berusia di bawah 40 tahun tetap bisa menjadi capres atau cawapres dengan syarat pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Keputusan itu membuat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, bisa bertarung pada Pilpres 2024. Pasalnya, Gibran masih berusia 36 tahun namun menjabat sebagai Wali Kota Solo. Rahayu mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden tidak hanya berlaku untuk Pemilu 2024 saja. Aturan itu, kata Saraswati, bisa berlaku untuk pemilu-pemilu berikutnya. "Keputusan MK itu dampaknya untuk ke depan, bukan hanya untuk Pemilu 2024 saja," ujarnya.

Putri dari Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, tersebut menilai putusan itu akan berdampak panjang terhadap politik di Indonesia. Dia berharap aturan itu akan bisa memberikan semangat bagi anak-anak muda untuk turut berpartisipasi dalam politik di masa depan "Harapannya masyarakat itu bisa diberikan pendidikan politik yang baik dan benar bahwa keputusan MK itu dampaknya untuk ke depannya, bukan Pemilu 2024 saja," ujar dia.

Prabowo Subianto saat ini merupakan satu-satunya bakal capres yang belum menentukan pilihan pendampingnya. Hari ini, pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud Md bahkan telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Koalisi Indonesia Maju belum menentukan pendamping Prabowo karena salah satu ketua umum anggota koalisi itu sedang tak berada di Indonesia. Sosok tersebut tak lain adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang juga merangkap sebagai Menteri Perdagangan. Zulhas, sapaannya,

sedang mendampingi Presiden Jokowi melawat ke Cina dan Arab Saudi. Rombongan itu dijadwalkan kembali ke tanah air pada Sabtu mendatang, 21 Oktober 2023.

Selain Gibran Rakabuming Raka, masih terdapat sejumlah nama yang dipertimbangkan KIM sebagai cawapres Prabowo. Mereka diantaranya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra.

Lampiran 5

Kriteria Cawapres Prabowo: Muda dan Berpengalaman di Pemerintahan, Gibran atau Erick Thohir?



Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (kiri) bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (tengah) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengecek persiapan lokasi pesta rakyat dan resepsi ngunduh mantu acara pernikahan Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono, di Solo, Jawa Tengah, Rabu, 7 Desember 2022. Resepsi ngunduh mantu pernikahan Kaesang Pangarep dengan Erina Gudono akan digelar di Pura Mangkunegaran, Solo, Jawa Tengah, Ahad besok. ANTARA/Maulana Surya

TEMPO.CO, Jakarta - Subianto menjadi satu-satunya bakal capres yang belum memiliki cawapres yang mendampinginya pada Pilpres 2024. Sejumlah nama pun kian santer disandingkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Kandidat cawapres Prabowo di antaranya Menteri BUMN Erick Thohir dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo akan mengungkapkan nama cawapres mereka beberapa jam sebelum pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Akan tetapi, Muzani tak bisa memastikan kapan pasangan capres-cawapres yang akan mereka usung melakukan pendaftaran “Mudah-mudahan bukan sehari-dua hari, jam-lah mudah-mudahan,” kata Muzani saat ditemui di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Oktober 2023.

Muzani juga memberi isyarat kandidat bakal cawapres Prabowo. Dia mengatakan sosok cawapres Prabowo itu merupakan anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Namun, Muzani enggan menyebut secara spesifik nama sosok cawapres itu. Kisi-kisi itu kian jelas. Sebelumnya KIM hanya membocorkan kandidat cawapres mereka ada empat. Masing-masing berasal dari Luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Soal empat nama itu, pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menyebut, mereka di antaranya adalah Yusril Ihza Mahendra untuk luar Jawa, Gibran Rakabuming Raka untuk Jawa Tengah, untuk Jawa Timur ada Khofifah Indar Parawansa, dan di Jawa Barat Ridwan Kamil. Sementara Erick Thohir, kata dia, tereliminasi. “Di luar Jawa itu pasti Yusril, kalau Erick Thohir itu lahirnya di Jakarta. Jadi Erick itu sudah tereliminasi,” ujar Emrus melalui keterangan resminya, Sabtu 14 Oktober 2023.

Erick Thohir Ancang-ancang Jadi Cawapres Prabowo

Namun, justru Erick Thohir yang belakangan paling kuat memancarkan “sinyal” jadi cawapresnya Prabowo. Sosok Ketua PSSI itu dikabarkan telah membuat surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Informasi itu dibenarkan oleh Polri. Kendati begitu, Humas Polri tidak menyebutkan peruntukannya. Sementara itu, PAN, pengusung Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo, menyebut SKCK itu untuk berjaga-jaga “Anggap saja melaksanakan pepatah sedia payung sebelum hujan. Kalau nanti diperlukan, ya, sudah ada,” kata Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Dauly seperti dikutip Kantor Berita Antara, Rabu, 18 Oktober 2023.

Erick juga diketahui telah mengurus surat keterangan tidak pernah terpidana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel. Dalam foto surat yang diperoleh Tempo, PN Jaksel menyatakan surat itu dibuat sebagai syarat mendaftar sebagai cawapres. Surat itu tertanggal 16 Oktober 2023. Dalam keterangannya, PN Jaksel menyatakan Erick tak pernah tersangkut masalah hukum “Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Wakil Presiden Republik Indonesia,” cuplikan isi surat tersebut.

Kabar Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres Prabowo juga tak kalah santer. Apalagi setelah Mahkamah Konstitusi atau MK pada Senin lalu membuat keputusan yang memuluskan jalan bagi Wali Kota Solo maju itu di Pilpres 2024. Pun sejauh ini, selaku kader PDIP, Gibran juga belum memutuskan gabung dengan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) untuk memenangkan Ganjar Pranowo, capres usungan partainya.

Gibran dipinang PBB untuk jadi bakal cawapres Prabowo pada September lalu. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jendral PBB Afriansyah Noor setelah membuka “event Job Fair Career Expo 2023” di Graha Wisata Niaga, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Selain mengajukan Yusril, kata Afriansyah, partainya juga menawarkan putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai bakal cawapres kepada Prabowo “Perlu diketahui sebagai sekjen Partai Bulan Bintang, salah satunya (PBB) mencalonkan wakil presiden yang

ada di tengah-tengah kita hari ini, selain Pak Yusril ya Mas Gibran Rakabuming Raka,” kata Afriansyah Noor pada Selasa, 26 September 2023.

Saat persamuhan para elite parpol KIM di kediaman Prabowo, Kertanegara 4, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2023, PBB pun masih kukuh mengusulkan nama Gibran sebagai bakal cawapres. Afriansyah Noor mengatakan, para partai anggota koalisi diperkenankan mengusulkan dua sampai tiga nama. Pihaknya mengatakan Ketua PBB Yusril Ihza setuju, selain nama dirinya, PBB juga mengusulkan nama Gibran “Atas kesepakatan kami berdua dengan Ketua Umum dan Sekjen, kami menulis dua nama. Nama pertama Pak Yusril, tetap sebagai ketua umum kami. Kami usulkan yang kedua nama Mas Gibran,” kata dia kepada Tempo, Sabtu, 14 Oktober 2023.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengakui nama Gibran masih masuk dalam daftar cawapres pendamping Prabowo. Namun, penentuan sosok cawapres tersebut masih menunggu seluruh ketua umum partai anggota KIM berada di Indonesia. Pasalnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang juga Menteri Perdagangan masih dinas kenegaraan bersama Presiden ke Cina dan Arab Saudi “Masih lah (Gibran dipertimbangkan). Karena kan kita masih menunggu sampai semua pimpinan KIM pulang ke Indonesia untuk bisa dirapatkan bersama,” ujar Rahayu saat ditemui di Perpustakaan Nasional RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 19 Oktober 2023.

Koran Tempo terbitan Jumat, 20 Oktober 2023 melaporkan, Kamis lalu tersebar pesan berantai lewat WhatsApp yang isinya menginformasikan bahwa Gibran akan bergabung ke Partai Golkar lewat AMPI. Pesan berantai itu diperkuat dengan informasi dua sumber Tempo di lingkup internal Partai Gerindra dan lingkaran Istana. Gibran akan maju jadi cawapres Prabowo lewat partai beringin. Informasi ini dibocorkan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono “Kalaupun bukan dari Golkar, akan ‘di-Golkar-kan’ dulu. Bisa melalui AMPI atau ormas hasta karya lainnya,” kata Agung lewat keterangan tertulis, Selasa, 17 Oktober 2023, dikutip Koran Tempo.

Belakangan Gibran membantah kabar dirinya merapat ke Partai Golkar atau bergabung ke organisasi AMPI. Bantahan itu disampaikan Gibran saat ditemui awak media di Kantor DPRD Kota Solo se usai mengikuti rapat paripurna, Kamis, 19 Oktober 2023. “Nggak. Iki lho aku neng kene terus ki lho (ini saya di sini terus). Ora neng ngendi-ngendi (tidak kemana-mana). Jadi nggak benar,” ujarnya, di Solo, Kamis.

Gibran memang jadi gemar membantah isu-isu tentang dirinya akhir-akhir ini. Dia juga membantah isu yang beredar terkait dirinya telah membuat SKCK untuk daftar cawapres. Kabar itu mencuat setelah Erick Thohir diketahui mengurus surat keterangan tidak pernah terpidana dari PN Jaksel. Jawaban Gibran mirip-mirip dengan bantahannya ihwal gabung AMPI. “Neng endi wong neng kene terus nuh. Aku neng kene terus lho (Di mana, saya kan di sini terus lho),” ujar Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo, Kamis pagi.

Namun ucapan Gibran adalah benar adanya. Pihaknya bahkan meminta awak media untuk memeriksa apakah ada permohonan SKCK di Polda Jawa Tengah atas nama

dirinya. Hingga hari pertama pendaftaran capres-cawapres pada Kamis, 19 Oktober 2023, memang belum ada permohonan SKCK di Polda Jawa Tengah atas nama Wali Kota Solo itu. “Setelah dicek belum ada,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisariss Besar Satake Bayu Setianto pada Kamis.

Erick Thohir sudah ancang-ancang jadi cawapresnya Prabowo. Sementara Gibran bagai malu-malu kucing. Tapi, bagaimanapun, dua sosok ini selaras dengan kriteria cawapres Prabowo yang dibocorkan Ahmad Muzani: Muda dan berpengalaman di pemerintahan. Erick jelas lebih berumur dibanding Gibran, tapi usia Ketua PSSI itu tentu lebih “muda” dibandingkan Prabowo. Sedangkan Gibran baru 36 tahun saat pendaftaran capres-cawapres dimulai.

Apalagi, keduanya sudah berpengalaman di pemerintahan. Erick seorang Menteri BUMN yang malang melintang di urusan eksekutif membantu Jokowi. Sementara Gibran, walau disebut “masih ingusan”, tetapi kinerjanya diakui warga Solo. Kans keduanya jadi cawapres Prabowo memang besar. Bisa jadi satu di antara mereka yang maju, atau justru sosok lain. Yusril Ihza Mahendra misalnya.

Lampiran 6

Soal Isu Bergabung ke Golkar, Gibran Rakabuming Sebut Sudah Bertemu Puan Maharani



Wali Kota Solo Gibran Rakabuming usai menghadiri rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar di DPP Golkar, Jakarta Barat pada Sabtu, 21 Oktober 2023. Gibran didampingi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika meninggalkan lokasi rapimnas. TEMPO/Sultan Abdurrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi kabar soal dirinya akan pindah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke Partai Golkar untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Gibran mengatakan sudah beretemu dengan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani untuk membahas masalah itu "Sudah ya, sudah ketemu Mbak Puan," kata Gibran saat menghadiri acara deklarasi dukungan

bertajuk Indonesia Memanggil Gibran di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 21 Oktober 2023. Tempo sudah mencoba mengonfirmasi soal keluarnya ia dari PDIP sebanyak tiga kali. Jawaban Gibran tetap sama soal ini, yaitu ia sudah bertemu Puan Maharani.

Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran menghadiri acara deklarasi dukungan yang digelar Gerakan Indonesia Berani ini mendukung Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 "Terima kasih untuk doanya, terima kasih sudah datang ke acara ini. Pokoknya kita pingin Pilpres semuanya aman dan damai, itu yang paling penting. Semuanya harus rukun, gak boleh ada yang berantem apalagi berantem di sosmed pokoknya dibawa santai saja," kata Gibran di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada Sabtu, 21 Oktober 2023.

Gibran yang hadir menggunakan kemeja kotak-kotak merah hitam meminta maaf kepada para pendukungnya atas keterlambatannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa hari ini baru saja mengunjungi para ketua umum Koalisi Indonesia Maju. "Ada kejutan-kejutan berikutnya, ditunggu aja ya," ucap dia.

Dari pantauan Tempo, acara yang dimulai sejak pukul 19.00 WIB tersebut tampak dipadati pemuda hingga orang tua yang membawa poster dan mengenakan baju bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pamflet bertuliskan 'Indonesia Memanggil Gibran' tertulis didepan pintu masuk Tugu Proklamasi. Selain itu, beberapa organisasi seperti aktivis '98 hingga mahasiswa memberikan pandangannya tentang Gibran.

"Kami mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil Presiden Republik Indonesia, berpasangan dengan Bapak Prabowo Subianto pada Pemilu mendatang. Kami siap bahu-membahu siap bergotong-royong untuk melakukan kerja elektoral demi kemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres mendatang," ucap dua pemuda yang membacakan isi deklarasi di depan massa.

Sebelumnya, tiga partai anggota Koalisi Indonesia Maju mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Ketiga partai itu adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar.

PBB sejak awal mengusulkan nama Gibran menjadi pendamping Prabowo. Sekretaris Jenderal PBB, Afriansyah Noor, menyatakan mereka juga mengusulkan nama Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra.

Belakangan, Yusril menyarankan Gibran untuk tak mengambil kesempatan untuk menjadi cawapres. Pasalnya, dia menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka celah bagi Gibran untuk menjadi cawapres dinilai cacat hukum. Meskipun demikian, Yusril menyerahkan sepenuhnya keputusan itu pada Koalisi Indonesia Maju. PAN awalnya mengusung Erick Thohir sebagai cawapres pendamping Prabowo. Akan tetapi, kemarin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memberi sinyal untuk mendukung Gibran dalam unggahannya di media sosial Instagram. Zulkifli mengunggah foto dirinya bersama Gibran "Agar indonesia maju terus, silaturahmi tidak boleh terputus.

Bismillah mas Wali," tulis Zulhas dalam keterangan unggahan tersebut. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menilai unggahan Zulhas itu sebagai lampu hijau bagi Gibran untuk mendampingi Prabowo pada Pilpres 2024. Meskipun demikian, dia menyatakan keputusan akhir akan diumumkan oleh Prabowo.

"Kalau dari pengertian postingan Bang Zulhas hari ini, bilang Bismillah Mas Wali, itu berarti oke ya, berangkat jadinya, emang ada yang lain?" ujar Viva. "Jadi ya dalam pertemuan tadi sih ya hanya penegasan aja, nanti secara resminya diumumkan Pak Prabowo." Sementara Partai Golkar secara resmi mengusulkan nama Gibran Rakabuming Raka sebagai capres setelah menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Sabtu kemarin, 21 Oktober 2023. Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, mengumumkan secara langsung keputusan itu. "Mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasang dengan Pak Prabowo. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada Bapak Prabowo dan ini untuk dibawa dalam pertemuan forum ketua umum partai," kata Airlangga di DPP Partai Golkar.

Gibran Rakabuming Raka saat ini masih terdaftar sebagai kader PDIP. Partai berlambang banteng moncong putih itu secara resmi telah mengusung eks Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ganjar berpasangan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md.

Lampiran 7

Relawan Sebut Penunjukkan Gibran Tidak Menimbulkan Ego Anggota Koalisi



Bakal Calon Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) saat mengumumkan Calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Rumah Kertanegara, Jakarta, Ahad, 22 Oktober 2023. Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Relawan Jaringan Merah Putih 08 mengatakan anggota partai pendukung Prabowo Subianto itu tidak menunjukkan ego saat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai calon wakil presiden pendamping

Prabowo. Relawan menyebut anggota Koalisi Indonesia Maju menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik.

"Seluruh anggota koalisi yang tergabung satu suara mencalonkan Gibran menjadi pasangan Prabowo Subianto untuk menggarungi Pilpres 2024," kata Ketua Umum Jaringan Merah Putih 08, Poltak Agustinus Sinaga, melalui pesan WhatsApp kepada *Tempo*, Ahad malam, 22 Oktober 2023.

Poltak mengatakan, kehadiran Gibran Rakabuming, anak sulung Presiden Joko Widodo alias Jokowi, di tengah Koalisi Indonesia Maju, memberikan energi positif bagi koalisi itu. Gibran yang kini menjabat Wali Kota Solo, diumumkan sebagai bakal calon presiden. Ia berpasangan dengan Menteri Pertahanan, lawan Jokowi di Pemilihan Presiden 2019. Deklarasi itu berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Ahad malam.

Jaringan Merah Putih menilai penetapan Gibran sebagai pasangan Prabowo tidak terlepas dari sepak terjang pria 36 tahun itu memimpin Kota Surakarta. Menurut Poltak, koalisi memilih Gibran karena dianggap mampu mensukseskan 17 program unggulan Prabowo "Sosok Gibran bisa disebut sebagai pembeda bila dibandingkan dengan kepala daerah saat ini, yang cenderung monoton," kata Poltak. "Gibran menunjukkan kepemimpinan gaya anak muda yang lebih kreatif dan responsif." Belasan program unggulan yang dicanangkan Prabowo, yaitu mencapai swasembada pangan, air, energi, memberantas kemiskinan, korupsi, meningkatkan pelayanan kesehatan dan obat untuk rakyat, memperkuat pertahanan negara.

Menyempurnakan penerimaan keuangan negara, menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, menyediakan rumah murah kepada masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan, memberantas narkoba.

Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, memperkuat pendidikan, sains, dan teknologi, elakukan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, menjamin pelestarian lingkungan hidup, melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga.

Setelah Ketua Umum Partai Gerindra mengumumkan nama Gibran sebagai calon wakilnya, relawan mulai bergegas. Relawan Kami Gibran mengatakan saat ini fokus mereka adalah memenangkan Prabowo-Gibran. Rencana strategis mereka adalah berkampanye dengan mengadakan berbagai kegiatan "Kita akan adakan program pelatihan untuk anak muda. Seperti digital marketing, public speaking, entrepreneur, dan lainnya," kata Ketua Umum Kami Gibran, Jamalul Izza, saat dihubungi, Ahad malam, 22 Oktober 2023.

Lampiran 8

Peluang Gibran Maju Cawapres Pascaputusan MK? Anggota Tim Ahli Wantimpres: Sangat Bisa



Anggota Tim Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Henry Indraguna. Foto: Ist

JAKARTA - Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jadi sorotan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi dia belakangan digadang-gadang Bagaimana peluang Gibran maju pada Pilpres 2024? Anggota Tim Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Henry Indraguna menilai bila dikaitkan berdasarkan putusan MK tentu secara hukum jawabannya sangat bisa. "Dikarenakan saat ini Gibran merupakan salah satu yang sedang menjabat sebagai kepala daerah yakni Wali Kota Solo yang dipilih berdasarkan pemilihan umum sebagaimana digariskan dalam putusan MK," ujar Henry, Senin (16/10/2023). MK telah menguji ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. MK dalam pertimbangannya menyatakan pemaknaan yang tepat untuk rumusan norma a quo adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Dengan demikian, karena jabatan kepala daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota saat ini paradigmanya adalah jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga selengkapnya norma a quo berbunyi "berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan a quo berlaku mulai pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan seterusnya.

Berangkat dari pertimbangan tersebut, MK memberikan putusan yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Kemudian, menyatakan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga, Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan amar putusan tersebut, kata Henry, dapat diketahui bahwa terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden paling rendah 40 tahun dan atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Artinya, MK memberikan batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden yakni paling rendah 40 tahun. Namun, batasan tersebut disertai dengan kata dan atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

"Artinya, sepanjang calon presiden dan wakil presiden tersebut pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, maka dapat mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Hal itu dikarenakan kata dan atau dalam hukum merupakan kata yang dimaknai sebagai suatu alternatif atau pilihan," ujar Henry.

Lampiran 9

Soroti Putusan Batasan Usia Capres-Cawapres, Ketua DPD: MK Sudah Tercemar Tradisi Politik



Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah tercemar tradisi terkait putusan batasan usia capres-cawapres. Foto/MPI

JAKARTA - Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah tercemar tradisi terkait putusan batasan usia capres-cawapres. Pernyataan itu sekaligus menanggapi perbedaan pendapat (dissenting opinion) Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang gugatan batas usia capres-cawapres.

Dalam pendapatnya, Saldi mengakui ada peristiwa aneh saat memutus perkara kepala daerah bisa maju pilpres meski di bawah umur 40 tahun. LaNyalla merasa hal itu telah menunjukkan Indonesia semakin krisis negarawan karena semua lembaga sudah berpolitik praktis, termasuk hakim konstitusi. "Pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra itu menunjukkan bahwa MK sebagai the guardian of constitution sudah tercemar tradisi politik. Ini tentu sangat buruk bagi Indonesia," ujar LaNyalla dalam keterangan resminya yang dikutip, Selasa (17/10/2023).

Lebih lanjut, LaNyalla merasa negeri ini semakin kehilangan jati diri, dan nilai-nilai adab, etika, dan moral. Perasaan itu, lanjutnya, mulai terlihat sejak Indonesia menganut sistem liberal dengan pemilihan presiden dan kepala daerah langsung dan dominasi partai politik sebagai pemegang kedaulatan. "Negara yang menganut liberalisme dan terseret ke neoliberal serta ekonomi yang kapitalistik, pasti ditandai dengan kemenangan materialisme atas idealisme. Itu sudah prinsip. Sehingga perilaku politik Indonesia semakin tidak punya malu dan mendapat pemakluman dari elite. Rakyat terus diberi pertunjukan dan contoh buruk seperti itu," jelas LaNyalla. Ia pun menyinggung soal batas usia capres dan cawapres.

Menurutnya, Indonesia tak bisa disamakan dengan negara-negara kecil di Eropa atau Skandinavia sehingga pemimpin Indonesia dibutuhkan orang yang matang dan dewasa secara usia. "Karena negara ini berdasarkan ketuhanan, maka tradisi di dalam pemahaman agama, bahwa usia matang seseorang itu juga harus menjadi rujukan. Jangan ditabrak, hantam kromo begitu saja. Ini bukan negara suka-suka dan uji coba," katanya.

Kendati demikian, LaNyalla merasa sudah saatnya Indonesia menyadari bila sistem saat ini semakin kebablasan dan semakin meninggalkan Pancasila. Untuk itu, ia merasa negeri ini harus kembali ke falsafah dasar bangsa. "Sistem yang dirumuskan pendiri bangsa itu bukan sistem Orde Baru, tetapi sistem demokrasi Pancasila murni yang belum pernah diterapkan secara benar," pungkasnya.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengakui ada peristiwa aneh dalam putusan perkara 90/PUU-XXI/2023 tentang gugatan batas usia capres-cawapres. "Sejak menapakkan kaki sebagai hakim konstitusi pada 11 April 2017 atau sekitar enam setengah tahun lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa," kata Saldi saat membacakan dissenting opinion dalam putusan tersebut, Senin (16/10/2023). Saldi melanjutkan dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutus perkara gelombang pertama pada 19 September 2023, Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memutus perkara. "Hasilnya enam hakim konstitusi sepakat menolak dan

memposisikan Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang," kata Saldi.

Selanjutnya, dalam perkara gelombang kedua yakni perkara 90/PUU-XXI/2023 dan 91/PUU-XXI/2023, Ketua MK Anwar Usman ikut memutuskan dalam perkara tersebut dan turut mengubah posisi para hakim yang dalam gelombang pertama menolak menjadi mengabulkan. Baca Juga Susah-susah Dibangun, Putusan MK Bikin Demokrasi Indonesia Mundur MK mengabulkan syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

Lampiran 10

Ditanya Sudah Urus SKCK untuk Pilpres 2024, Gibran: Belum Daftar, Makasih Ya



Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Foto/R August

SOLO - Sejumlah tokoh politik telah membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk keperluan maju Pilpres 2024 . Apakah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga sudah membuat SKCK untuk keperluan yang sama?

Saat dimintai tanggapan terkait hal tersebut, Gibran membantah bahwa dia tengah melakukan proses pembuatan SKCK. "Belum daftar, makasih ya. Saya paripurna dulu. Neng ndi? Wong aku neng kene terus (Di mana? Orang aku di sini terus)," katanya di Balai Kota Solo, Kamis (19/10/2023). Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu bahkan meminta awak media untuk langsung mengklarifikasi kabar tersebut ke Polda Jateng. "Aku kan neng kene terus (Aku kan di sini terus). Cek en neng Polda, telponen Polda (Cek di Polda, telepon saja Polda)," ujarnya.

Gibran pun mengimbau kepada awak media agar jangan membuat berita yang membuat resah. "Jangan membuat berita yang membuat resah," pungkasnya. Diketahui, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan kepala

daerah berusia di bawah 40 tahun maju pemilihan presiden, nama Gibran makin mengemuka sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden. Suami dari Selvi Ananda ini dikaitkan bakal menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Hingga kini Prabowo belum mengumumkan siapa yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Sementara, dua pasangan lainnya yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, hari ini sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lampiran 11

Gibran Bakal Maju Cawapres, Ahok Lebih Pilih Ganjar-Mahfud



Politikus senior sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tegas mendukung pasangan Capres-Cawapres 2024, Ganjar dan Mahfud. Foto/Aziz Indra

JAKARTA - Politikus senior sekaligus mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tegas mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Capres-Cawapres 2024. Meskipun isu yang beredar, anak sulung presiden Joko Widodo yang tak lain adalah sahabatnya, hendak maju sebagai Cawapres Prabowo.

"Ya sah-sah saja Gibran maju Cawapres, tergantung rakyat mau pilih apa enggak. Yang jelas saya pilih Ganjar Mahfud lah, keduanya sudah teruji dan berpengalaman," kata Ahok ditemui di Jakarta, Jumat (20/10). Ahok menilai, Gibran belum pantas menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Ia masih belum punya pengalaman yang luas soal ketatanegaraan. "Gibran belum berpengalaman. Jadi Wali Kota saja baru dua atau tiga tahun. Dia belum teruji," kata Ahok ditemui di Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Menuju Indonesia Unggul Untuk mengurus negara sebesar Indonesia, setidaknya lanjut Ahok harus punya pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi. Dengan pengalaman itu, maka seseorang dianggap mampu karena memiliki pengetahuan tata negara yang lengkap. "Kalau belum punya pengalaman dan anda maju presiden atau wakil presiden, nanti anda nggak ngerti. Ini bukan soal belajar

atau coba-coba lho. Ini negara dipertaruhkan untuk menjadi negara maju di tahun 2045, mana boleh kita kasih ke orang yang coba-coba," tegasnya.

Ahok tidak bermaksud meremehkan Gibran atau anak muda lainnya. Ia yakin bahwa anak muda bisa lebih kreatif. Tapi bicara tata negara, pemimpin lanjut Ahok harus mengerti konstitusi. Bukan hanya yang berani untuk maju, tapi yang lengkap dengan track record yang jelas. Butuh waktu dan pembuktian, tidak instan. "Saya tidak mau anak cucu saya harus menunggu sekian tahun lagi merasakan Indonesia maju. Kita nggak usah coba-coba deh, pilih yang pasti-pasti saja. Ganjar dan Mahfud yang jelas pengalamannya dan teruji," ucapnya.

Apalagi lanjut Ahok, dibutuhkan nyali besar untuk menjadi pemimpin Indonesia. Sebab, masalah yang digadapi sangatlah besar, khususnya memberantas korupsi. "Ini bicara nyali. Akar semua masalah di negeri ini kan korupsi. Mungkin dia (Gibran) jujur, tapi yang dibutuhkan tidak hanya jujur, melainkan jujur dan berani," tegasnya. Dan pasangan Ganjar Mahfud menurut Ahok adalah pasangan yang tepat. Keduanya sosok yang berani untuk membereskan akar persoalan bangsa yakni korupsi untuk bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Ganjar-Mahfud ini pasangan yang cocok. Kalau ditanya apa akar masalah bangsa Indonesia, ya korupsi. Selain sistem yang bagus, butuh kepala yang berani lurus. Ganjar dan Mahfud adalah pilihan tepat untuk menyelesaikan itu. Keduanya berani dan tegas kalau soal ini," ucap Ahok.

Lampiran 12

Golkar Resmi Usulkan Gibran Cawapres Prabowo



Partai Golkar resmi mengusulkan nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Foto/MPI

JAKARTA - Partai Golkar secara resmi mengusulkan nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto.

Hal tersebut diungkap, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Golkar yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (21/10/2023). "Bismillah maka saya ketok usulan Partai Golkar yang saya akan serahkan kepada bapak Prabowo dan ini untuk dibawa pak prabowo dalam pertemuan forum ketum partai," kata Airlangga.

Airlangga mengungkapkan, pengusulan tersebut berdasarkan pertimbangan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. "Stelah mencermati dan seksama dengan pertimbangan mengedepankan kepentingan lebih besar untuk bangsa dan negara, menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, pemerataan," katanya.

"Dan berdasarkan pertemuan dengan para Ketua DPD tadi malam kami rapat, mengusulkan saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasang dengan pak Prabowo sebagai bacawapres RI," sambungnya. Kemudian Airlangga bertanya kepada para kader yang hadir dalam rapimnas tersebut, dan serentak mereka menjawab setuju. "Apakah setuju?" tanya Airlangga. "Setuju," jawab para kader kompak. Tidak hanya itu, Airlangga pun turut menanyakan apakah seluruh peserta rapimnas setuju dengan usia Gibran Rakabuming yang belum menginjak 40 tahun. "Ada satu yang harus kami tanya juga, under 40?," katanya. "Setuju!" jawab kader.

Lampiran 13

Pengamat: Langkah Politik Jokowi terkait Gibran Cawapres seperti Dipaksakan



Pengamat politik UIN Jakarta, Ali Munhanif mengatakan, jika Presiden Jokowi memaksakan anaknya, Gibran menjadi cawapres. Foto/MNC Media

JAKARTA - Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ali Munhanif mengatakan, jika Presiden Jokowi tetap memaksakan anaknya, Gibran Rakabuming

Raka menjadi cawapres, maka pasangan Prabowo-Gibran kemungkinan besar akan kalah di Pilpres 2024.

"Pasangan ini besar kemungkinan akan kalah karena kontrol publik yang semakin kuat," kata Ali, Sabtu (21/10/2023). Manuver politik untuk mencawapreskan Gibran, kata Munhanif, akan terus dikontrol publik. Dan ini sudah terbukti dengan manuver politik sebelumnya, seperti wacana perpanjangan masa jabatan, penambahan masa jabatan presiden. Wacana-wacana tersebut pada akhirnya gagal.

"Kalaupun pencalonan Gibran menjadi exit strategi (dari rangkaian wacana penambahan masa jabatan, Red), itu bukan hal yang mudah, karena publik akan terus mengawal bagaimana demokrasi jangan sampai diarahkan oleh orang-orang yang semata-mata ambisius kekuasaan. Dan itu buruk," paparnya. Jika Jokowi maupun partai tetap nekat mendorong pencawapresan Gibran, Ali Munhanif mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran akan kalah.

"Kecuali mereka menggunakan alat-alat Kepolisian dalam proses pemilihan, kecurangan, atau cara-cara yang tidak fair dalam proses pemilihan. Jika tidak menggunakan itu maka Prabowo akan kalah," kata dia. Ali Munhanif juga menyebut pencalonan Gibran sebagai cawapres juga akan menyinggung budaya politik di Indonesia. Menurutnya, PDIP sangat marah dengan pencawapresan Gibran. "Pencalonan Gibran akan sangat rumit, bahkan blunder. Lalu dibaca sebagai upaya yang tidak terpuji dalam mempertahankan kekuasaannya," ungkap Ali Munhanif.

Menurut Ali Munhanif, Jokowi bisa saja berubah sikap dalam pencawapresan Gibran. Hal ini karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan umur capres/cawapres digaungkan cacat hukum oleh Yusril maupun para pakar hukum lainnya. Sentimen publik terhadap politik dinasti akan terus meningkat. "Itu membuat publik semakin sadar, sehingga pencalonan Gibran pasti akan blunder dan tidak akan mendongkrak pencalonan Prabowo Subianto," kata dia.

Dengan demikian demonstrasi massa tidak akan mempengaruhi Jokowi. Namun yang mempengaruhi adalah sentimen publik terhadap politik dinasti, pudarnya MK, Gibran yang makin diviralkan mengkhianati PDIP atau akan dipecat sehingga harus pindah ke Golkar. "Itu akan membentuk persepsi masyarakat bahwa ini demokrasi didominasi orang-orang yang ambisius terhadap kekuasaan," ungkap dia.

Lampiran 14

Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Wakil Ketua TPN Sebut PDIP Akan Mengikhhlaskan



Wakil Ketua TPN Ganjar Presiden Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa menyatakan, PDIP akan menerima dengan lapang dada Gibran Rakabuming Raka dipilih sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Foto/MPI

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa menyatakan, PDIP akan menerima dengan lapang dada Gibran Rakabuming Raka dipilih sebagai calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Saya yakin (ikhlas). Walaupun saya enggak tahu nanti kan," kata Andika setelah mendampingi pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, dikutip Senin (23/10/2023). Ketika ditanya kembali oleh awak media dengan pertanyaan yang sama, Andika kembali menegaskan. "Pasti sangat lah (ikhlas)," tegas Andika.

Mantan Panglima TNI itu menjelaskan TPN sudah menyiapkan alternatif nama jika ternyata Gibran tidak menjadi bagian dari struktur TPN Ganjar. Sebelumnya, Gibran telah diinstruksikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, untuk berperan sebagai juru bicara atau juru kampanye nasional (jurkamnas) dalam struktur TPN. Terkait siapa pengganti Gibran, Andika mengatakan keputusan ini akan dibahas dalam rapat finalisasi yang dijadwalkan besok pagi. Rapat tersebut juga akan membahas berbagai aspek, termasuk struktur organisasi, visi-misi, dan peran-peran kunci dalam tim.